

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BLITAR
 NOMOR : 188/31/409.116/KPTS/2017
 TANGGAL : 20 Juli 2017

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DI BUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Informasi apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Pasal 17 huruf H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP				
	1 Riwayat dan kondisi calon pegawai dan pegawai	- Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 / 2008 tentang KIP				
	a. Data pribadi pelamar umum pegawai	- Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 / 2008 tentang KIP	BKPSDM	- Selama proses penerimaan pegawai	- Data pribadi pelamar yang bersifat rahasia jadi terungkap	- Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data bersangkutan
	b. Biodata Pegawai	- UU No. 8 tahun 1974 ttg pokok pokok kepegawaian jo. UU No. 43 tahun 1999	BKPSDM	- Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan yg bersangkutan	- Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap	- Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data bersangkutan
	2 Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	- Pasal 17 huruf H UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP				
	a. Data rekam medis pasien rumah sakit/poliklinik	- Pasal 57 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	RSUD	- Apabila mendapat persetujuan bersangkutan dan keluarga	- Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	- Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data bersangkutan
		UU No. 39 Tahun 1000 ttg Hak Asasi Manusia				- Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi
	b. Hasil Uji Kesehatan Pegawai	- PP No. 26 tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS	RSUD	- Apabila mendapat persetujuan bersangkutan dan keluarga	- Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	- Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data bersangkutan
				Selama menjadi PNS		- Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi
	c. Hasil Rekomendasi Tes Psikologi	- Peraturan Ka. BKN No. 11 Thn. 2008 ttg Pedoman Penilaian Kopetensi PNS Jabatan Struktural	RSUD	- Apabila mendapat persetujuan bersangkutan dan keluarga	- Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	- Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data bersangkutan
				- Selama menjadi PNS		- Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi
	3 Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang	- Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP				
	a. Laporan Keuangan yang belum di audit	- Kemendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	- Sampai Audit selesai	- Informasi belum terjamin kebenarannya	- Laporan Keuangan yang belum diaudit tidak bisa diekspos
	b. Kode PIN Rekening Bank Pegawai	- UU No. 11 Tahun 2008 Ttg. 2008 ttg ITE pasal 1 angka 6	BPKAD	- Selama persetujuan yang bersangkutan	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Menjaga keamanan rekening Bank
	4 Hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, Intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang	- Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 ttg KIP				

1	2	3	4	5	6	7
	a. Daftar nilai DP 3 Pegawai	- PP 10 Th 1979 ttg penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	BKPSDM	- Selama periode penilai yg ditentukan	- Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Melindungi privasi data pribadi PNS
	b. Data usulan pemindahan, pengangkatan PNS	- PP No. 9 Th. 2003 ttg wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai	BKPSDM	- Sampai diterbitkannya SK	- Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS	- Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan pemerintahan
2	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR) dan Rahasia R dan konfidensial	- Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 80 Tahun 2012 tentang pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah	Inspektorat	- Hingga proses surat tersebut selesai	- Menghambat kebijakan pimpinan	- Menjaga kerahasiaan data pemerintahan
					- Membahayakan dan merugikan Negara	- Menjaga Kondisi yang kondusif, keamanan dan keselamatan Negara
3	Dokumen penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	- Pepres No. 54 tahun 2010 ttg pengadaan barang dan jasa pasal 66 - Perpres No. 70 tahun 2012 ttg pengadaan barang dan jasa	Badan Publik / OPD	- Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat	- Bisa menjaga ke akuratan dan obyektivitas penilaian
4	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	- Pepres No. 54 tahun 2010 ttg pengadaan barang dan jasa pasal 66 - Perpres No. 70 tahun 2012 ttg pengadaan barang dan jasa	Badan Publik / OPD	- Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	- Penetapan nilai pengadaan yang akurat yang akurat
5	Kode akses/Pasword Aplikasi Elektronik	- UU No. 11 Tahun 2008 ttg ITE	OPD	- Selama Pasword/kode digunakan	- Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	- Keamanan data bisa terjaga dengan baik
6	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	- Pasal 17 huruf j UU no 14 tahun 2009 ttg KIP	OPD	- Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	- sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	- sesuai alasan yang tersurat/tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
7	Dokumen kependudukan (Biodata, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta)	- UU .23/2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79 dan 84	Dispendukcapil	- Selama yang bersangkutan masih hidup	- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	- Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data / informasi
8	Besaran Pajak dan Wajib Pajak	- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Dispenda	- Selama menjadi wajib pajak ; Apabila mendapat persetujuan wajib pajak Diperlukan untuk kepentingan pengadilan	- Mengetahui rahasia perusahaan yang bersangkutan	- Menjaga privasi perusahaan
9	Data Identitas pelapor kejadian tidak baik	- Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	Inspektorat / Satpol PP	- Tidak Terbatas	- Terjadi Konflik dalam masyarakat	- Keamanan pelapor dilindungi
10	Usulan besaran UMK	- UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan ; Kepres No.107/2004 tentang Dewan Pengupahan	Disnakertrans	- Sampai Dikeluarkan Rekomendasi UMK dari Walikota Ke Gubernur	- Dapat Menimbulkan Demo , unjuk rasa / gejolak	- Menjaga suasana Hubungan Industri yang kondusif
11	Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial	- UU No. 2/2002 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Disperindag	- Selama Proses Mediasi	- Dapat Mengungkap Data Para Pihak Yang Berselisih yang bersifat rahasia	- Menjaga Suasana Hubungan yang Industri yang kondusif

1	2	3	4	5	6	7
12	Proses evaluasi andalalin	- PP No.32/2011 Tentang Manajemen Rekayasa , Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lulintas	Dinas Perhubungan	- Selama Proses Evaluasi	- Mengungkap Data Perusahaan (Premrakasa) yang bersifat rahasia	- Menjaga/Melindungi data / informasi dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menjaga suasana kondusif lingkungan kerja.
13	Hasil Evaluasi Kajian Andalalin	- PP No.32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa , ana Dampak serta Mnajemen Kebutuhan Lalu lintas	Dinas Perhubungan	- Apabila ada persetujuan pemrakasa	- Mengungkap data perusahaan (Premrakasa) yang bersifat rahasia	- Menjaga privasi , melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi oleh pihak lain serta menjaga suasana kondusif lingkungan kerja
14	Nama, Alamat Wajib Uji	- Perda No. 23 Tahun 2011 tentang Retriusi Jasa Umum	Dinas Perhubungan	- Sesuai Masa Berlaku masa uji kendaraan	- Mengungkap data Wajib Uji yang bersifat rahasia	- Melindungi data wajib uji dari penyalahgunaan oleh pihak lain
15	Data Identitas pemilik kendaraan bermotor (KB)	- Ps. 28f UUD 45, Ps. 28g UUD 45, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Dinas Perhubungan	- Selama KTB masih beroperasi	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi oleh pihak lain
16	Identitas tersangka penyelenggara lalulintas angkutan Jala	- KUHP	Dinas Perhubungan	- Sampai ada vonis yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap	- Dapat mengganggu proses hukum	- Perlindungan Oknum
17	Dokumen Perizinan	- UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	Dinas Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Selama izin masih dipergunakan Apabila mendapat persetujuan dari pemegang izin Apabila perlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang berwenang	- Mengungkapkan data pribadi pemegang izin	- Menjaga privasi dari pemegang izin
18	Pengaduan	- UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	OPD	- Selama proses pengaduan selesai	- Mengungkapkan data pribadi pemegang izin	- Menjaga privasi dari pemegang izin
19	Izin Perceraian PNS	- UU No.8/1974 ttt Perkawinan	Inspektorat	- Proses perizinan sampai dengan penjatuhan keputusan	- Pihak luar campur tangan	- Kelancaran proses perceraian
20	SPJ, SPM, SPP, SP2D	- UU No. 8/1974 ttt Keuangan Negara, UU No. 1 Th 2004 ttt Perbendaharaan Negara	BPKAD / OPD	- Masa Pelaksanaan Pekerjaan	- Mengungkapkan data ketidakwajaran	- Menjaga Kerahasiaan pembelanjaan
21	KTP Sertifikat Tanah Sertifikat Tanah	KK - Pasal 64 ayat 3 UU No.23 Th 2006	OPD	- Selama masih berlaku	- Mengungkapkan data pribadi	- Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data
22	Berkas-berkas perkara hukum yang melibatkan Pemerintah Kabupaten		Bagian Hukum	- Selama proses perkara		- Menjaga keadaan yang kondusif
23	Dokumen usulan PPK - BLUD	- Permendagri No. 61 Tahun 2007	OPD	- Selama SKPD/unit kerja menjadi PPK - BLUD	- Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	- Dapat menjaga obyektifitas penilaian
24	Data Aplikasi MDK (Pemutakhiran Data Keluarga) by name by addrses	- UU 52 Th. 2009	P2KBP3A	- Yang bersangkutan meninggal dunia	- Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	- Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

1	2	3	4	5	6	7
25	Data Kegagalan dan komplikasi KB	- UU 52 Th. 2009	P2KBP3A	- Yang bersangkutan meninggal dunia	- Penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	- Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia Mengamankan program KB
26	Informasi mengenai Data Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada anak	- UU No.22 Tahun 2003 mengenai Hak-hak Perlindungan Anak	P2KBP3A	- Selamanya	- Mengungkapkan data Korban/Pelapor yang menjadi Rahasia	- Menjaga privasi dan keamanan Korban dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti: ancaman, dll
27	Informasi mengenai rekapan data permasalahan masyarakat yang masuk dalam pendataan Mitra Keluarga di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan, antara lain kasus/permasalahan: Rmah Tangga, Ekonomi, Kesehatan, dan permasalahan lain yang dihadapi oleh	- Kode etik penanganan kasus	P2KBP3A	- Selamanya	- Mengungkapkan data Korban/Pelapor yang menjadi rahasia	- Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti: ancaman, dll
28	Laporan Hasil Pemeriksaan	- 1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 2. Peraturan Mendagri No. 51 tahun 2010	Inspektorat	- Mendapat persetujuan Pihak yang Berwenang	- Menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya	- Rekomendasi/Pernyataan yang dimuat dalam LHP dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perhatian sistem tata kelola
29	Laporan Pemeriksaan oleh Tim Auditor (Bank Indonesia/OJK/Akuntan Publik)	- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan ayat 33	BPKAD/Dinas Pendapatan/ Inspektorat	- Tidak terbatas	- Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	- Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
30	Keterangan data nasabah penyimpan dan simpanannya	- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ayat 40	OPD	- Sampai batas waktu yang diatur dalam Undang-undang	- Mengungkap data pribadi nasabah yang bersifat rahasia	- Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
31	Data EX Tapol G 30 S/PKI	- Instruksi Mendagri No. 32 Tahun 1981	BKPSDM	- Sampai terbitnya Regulasi Baru	- Memicu Konflik antar masyarakat	- Menghindari konflik antar masyarakat
32	Dokumen Pertahanan	- UU Pertahanan No. 10 Th 1960	Kesbangpol	- Selama pemilik tidak berubah	- Kerahasiaan hak pemilikan	- Penyalahgunaan kewenangan
33	Penilaian Kinerja Pegawai	- Peraturan Walikota No. 23 tahun 2007	BKPSDM	- Selama Periode	- Mengungkapkan data pribadi pegawai	- Menjaga kerahasiaan pegawai
34	Hukuman Disiplin Pegawai	- PP No. 56 tentang Hukuman Disiplin Pegawai	Inspektorat	- Seterusnya	- Mengungkapkan data pribadi pegawai	- Menjaga kerahasiaan pegawai
35	Penilaian Prestasi Kerja PNS (mulai th 2014)	- PP 46 th 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	BKPSDM	- Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian)	- Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

SEKRETRAI DAERAH

